

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara demokrasi ke tiga dunia, Indonesia telah melewati beberapa fase dalam menentukan hakikat negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai dan kaidah berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasca reformasi 1998-1999 pilihan sebagai negara demokrasi menjadi perhelatan panjang dalam agenda transformasi demokrasi nasional yang selama 32 tahun bersifat *top down* beralih pada demokrasi yang bersifat *bottom up*, perdebatan ini kemudian melahirkan suatu kesepakatan bahwa ukuran kecerdasan demokrasi bagi Indonesia adalah melalui proses transformasi demokrasi melalui penguatan nilai kearifan lokal masyarakat. Dengan demikian maka, demokrasi nasional sangat ditentukan oleh lokalitas kearifan demokrasi lokal Indonesia. Rujukan tersebut menunjukkan bahwa, pemilihan kepala daerah sebagai pengejawantahan demokrasi nasional adalah bagian dari proses pendewasaan demokrasi menuju negara demokrasi modern.

Salah satu agenda demokrasi dari pengejawantahan demokrasi nasional adalah melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota. Dengan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan rakyat di tingkat daerah dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya dan ikut terlibat langsung proses pengambilan keputusan menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Artinya bahwa demokratisasi ditingkat lokal sebagai proses modernisasi demokrasi nasional akan memberikan peran sepenuhnya kepada masyarakat lokal tanpa intervensi dari kepentingan nasional.

Secara teoritis, praktik pemilihan secara langsung (Pilkada), diyakini akan mampu mewujutkan pemerintahan yang lebih demokratis, serta terjadinya peningkatan percepatan kesejahteraan rakyat. Pemilihan secara langsung memberi ruang bagi masyarakat menentukan sendiri pilihannya, sehingga akuntabilitas kandidat terpilih lebih mampu dipertanggungjawabkan. Disamping itu pilkada langsung menjamin terjadinya sirkulasi elit-elit politik sehingga potensi konflik antar elit politik dengan rakyat dapat diminimalisir. Hal ini juga searah dengan apa yang dikemukakan oleh Smith (dalam Held 2014) menegaskan bahwa pemilihan secara langsung bagi kepala daerah dan dewan perwakilan daerah merupakan syarat utama terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif, serta terbangunnya *political equality* ditingkat lokal. Meskipun dalam realitasnya tidak semua kepala daerah yang dipilih secara langsung akan lebih akuntabel dan responsif pada permasalahan rakyat bila dibandingkan dengan kepala daerah yang ditunjuk langsung, namun secara prosedural pemilihan kepala daerah secara langsung akan lebih baik dari system penunjukan (*indirect elected*).

Pelaksanaan pilkada sangat ditentukan oleh seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada dimaksud. Partisipasi politik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah partisipasi konvensional/langsung dan non konvensional atau tidak langsung. Untuk mensukseskan agenda pilkada. Partisipasi konvensional sangat diharapkan dalam meningkatkan partisipasi politik, salah satu agenda dari partisipasi konvensional dalam pilkada adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Pada aspek inilah, patut untuk ditelusuri lebih detail tentang bagaimana pola sikap atas pilihan politik yang dilakukan oleh masyarakat pemilih. Hal ini dikarenakan

baik tidaknya partisipasi politik masyarakat sangat ditentukan oleh perilaku politik bagi pemilih itu sendiri.

Dalam perkembangan teori perilaku politik modern, terdapat tiga pendekatan atau paradigma yang melandasi alur argumentasi dalam mengamati perilaku politik pemilih. *Pertama*, pendekatan sosiologis; pemilih memilih calon kandidat berdasarkan pada pertimbangan kesamaan suku, agama, ras, golongan, wilayah, ikatan keluarga. *Kedua*, Pendekatan Antropologi; pemilih memilih calon kandidat berdasarkan pada pertimbangan partai politik dan *Ketiga*, perilaku rasional; yang ditunjukkan lewat sikap kritis pemilih yang berdasarkan pada hitungan ekonomis, atau hitungan untung dan rugi. Ketiga pendekatan tersebut di atas adalah bagai terpenting dari preferensi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

Menyikapi hal tersebut di atas, tentunya masyarakat Kec.Lemito sebagai bagian dari wilayah administrasi di Kec. Lemito Kab. Pohuwato tentunya harus terlibat dalam proses pemilihan Gubernur Provinsi Gorontalo pada tahun 2017, keterlibatan dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur tersebut tentunya di dorong oleh berbagai macam faktor, tentunya faktor paling dominan adalah perilaku politik mereka dalam menentukan pilihan politik. Jika dikaitkan dengan paradigma dalam pendekatan perilaku politik, memungkinkan buat kita untuk menelaah secara mendalam tentang bagaimana perilaku pemilih di Kec.Lemito serta preferensi apa yang mereka miliki dalam menentukan hak politik sebagai bentuk dari partisipasi politik warga.

Sesuai dengan data observasi awal menunjukkan bahwa daftar pemilih tetap di Kec.Lemito pada pemilihan Gubernur Provinsi Gorontalo berjumlah 7.664 jiwa, sementara yang menggunakan hak pilih sebanyak 5.982 orang dengan angka partisipasi

politik masyarakat 78% yang menggunakan hak pilih, artinya bahwa pada angka ini sebenarnya tingkat partisipasi politik masyarakat setara dengan Kec. lain di Provinsi Gorontalo yang dapat dikategorikan baik. Sementara itu, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 1.682 jiwa atau berkisar 22 %. Dari angka partisipasi politik tersebut diklasifikasi melalui perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilihat bahwa pasangan Hanah Hasana dan Tony Junus (HATI) memperoleh suara 1.560 atau berkisar 20,35%, kemudian pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim (NKRI) sebagai pasangan yang menang di Kec. Lemito dengan perolehan suara sebanyak 3.546 atau 46,26%, serta nomor urut 3 pasangan Zainuddin Hasan dan Adhan Damba (ZIHAT) memperoleh suara 876 suara 11,43 %.

Merujuk pada data tersebut sangat sinkron dengan perolehan kursi pada pemilihan Legislatif 2014, dimana Golkar sebagai pemenang di wilayah dapil 4 Pohuwato termasuk Kec. Lemito memperoleh 3 kursi. Artinya bahwa, dengan temuan data tersebut menunjukkan bahwa pemilih di kec. Lemito lebih mengarah pada pendekatan antropologi atau identifikasi partai. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan dan observasi awal peneliti menunjukkan bahwa, pemilih memilih calon kandidat berangkat dari pertimbangan partai politik dari calon. Selain itu dukungan politik oleh Bupati yang notabene sebagai ketua DPD Golkar Kab. Pohuwato yang menjadi dasar utama bagi pemilih dalam menentukan sikap politik. Maka dari itu saya sebagai penulis tertarik melakukan pengajuan proposal/skripsi ini dengan judul **“Perilaku Pemilih Masyarakat Kec. Lemito Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perilaku Pemilih Masyarakat Kec. Lemito Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 ?
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Masyarakat Kec. Lemito Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Perilaku Pemilih Masyarakat Kec. Lemito Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Masyarakat Kec. Lemito Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Kec. Lemito pada pemilihan kepala daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017
- 2 Untuk bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan perubahan yang baik bagi masyarakat Kec. Lemito.